

BAB II

POTENSI PEMBANGUNAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Otonomi daerah menjadi tonggak awal pergeseran penyerahan kekuasaan di pemerintahan pusat kepada pemerintah di daerah. Otonomi daerah menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya demi memajukan pembangunan daerah maupun nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah sebagai dasar keleluasaan pemerintah untuk membangun wilayahnya termasuk dalam pembangunan dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di nilai memiliki hubungan yang sangat erat dalam pembangunan di suatu daerah. Hal ini juga menjadi salah satu elemen untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan membangun daerahnya serta dalam memanfaatkan otonomi daerah.

Pembangunan daerah selalu dikaitkan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bagi suatu daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan angka peluang kerja bagi masyarakat di daerah.¹ Dengan berbagai perubahan ekonomi yang senantiasa berkembang, mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu menjawab permasalahan tentang pertumbuhan dan

¹ Subandi. 2012. *SISTEM EKONOMI INDONESIA*. Bandung. Alfabeta

pembangunan ekonomi di daerah. Investasi asing menjadi solusi bagi pemerintah di daerah untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu pemerintahan di daerah yang menggunakan investasi asing bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Otonomi daerah menjadi jaminan bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bagi keberlangsungan investasi asing di daerah.

A. Gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian tengah pesisir selatan Pulau Jawa dan dibatasi langsung oleh Samudera Hindia di bagian selatan serta dibatasi oleh Propinsi Jawa Tengah dibagian lainnya. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah daratan dengan topografi berbukit dan bergunung, yang berada pada ketinggian antara 0 - 2.910 meter di atas permukaan laut. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki perairan yang kebanyakan berupa sungai dan telaga. Berdasarkan pembagian administrasi wilayahnya, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 Kota, dengan pembagian² :

1. Kota Yogyakarta : luas 32,50 km², terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan

2. Kabupaten Bantul : luas 506,85 km², terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa

² Draft Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (R P J M D) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017 di kutip dari dppka.jogjaprovo.go.id/document/RPJMD/RPJMD29APRIL.pdf

3. Kabupaten Kulon Progo : luas 586,27 km², terdiri dari 12 kecamatan dan 88 desa

4. Kabupaten Gunungkidul : luas 1.485,36 km², terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa

5. Kabupaten Sleman : luas 574,82 km², terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa.

Tabel 2.1 Pembagian Administrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota, 2011	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa
Kulon Progo	Wates	12	88
Bantul	Bantul	17	75
Gunungkidul	Wonosari	18	144
Sleman	Sleman	17	86
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45
DIY	Yogyakarta	78	438

Lahan-lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan permukiman. Disamping itu, wilayah lahan juga mengandung sumber daya pertambangan/penggalian yang potensial untuk

dikembangkan lebih lanjut. Namun hingga saat kandungan sumber daya alam tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kekayaan budaya yang sangat beraneka ragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi, serta kesenian. Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar memeluk agama Islam (90 persen), dan sebagian yang lain beragama Kristen (5 persen), dan lainnya (5 persen).

Pada tahun 1990 penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat berjumlah 2.915.200 jiwa dengan kepadatan penduduk berjumlah 915 jiwa per kilometer persegi. Daerah tingkat II yang memiliki penduduk terpadat adalah Kotamadya Yogyakarta dengan tingkat kepadatan berjumlah 12.570 jiwa per kilometer persegi, sedangkan daerah yang memiliki jumlah penduduk yang terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul dengan tingkat kepadatan berjumlah 438 jiwa per kilometer persegi. Namun terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berada di wilayah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 3.487.325 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk berjumlah 1.095 jiwa per km². Penyebaran penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih terpusat di daerah Kabupaten Sleman. Sedangkan berdasarkan dari sisi laju pertumbuhan penduduk selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1,02 persen lebih rendah dari pada tingkat pertumbuhan nasional penduduk Indonesia, yaitu sebesar (1,49%).³

³ Profil Pembangunan Di.Yogyakarta dikutip dari rsimreg.bappenas.go.id/view/profil/clickD.php?id=14

Tabel 2.2 Persebaran Jumlah Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Luas(Km2)	Jumlah	Kepadatan Penduduk (Orang/Km2)
1	Kulonprogo	586,27	390.207	666
2	Bantul	506,85	921.263	1.818
3	Gunungkidul	1.485,36	677.998	456
4	Sleman	574,82	1.107.304	1.926
5	Yogyakarta	32,50	390.553	12.017
	JUMLAH	3.185,80	3.487.325	1.095

Dalam sector tenaga kerja, menurut data terbaru yang diperoleh pada tahun 2014. Jumlah angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 sebanyak 2.023.461 orang atau sebesar 71,05% dari total penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta berumur 15 tahun keatas. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 ini mengalami kenaikan sebesar 74.218 dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 1.949.243 orang. Dari total angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014, sebanyak 96,67% merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 3,33% merupakan pengangguran.

Angka IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan atau dipakai

untuk melihat tingkat kualitas penduduk di Daerah istimewa Yogyakarta. Angka harapan hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam katagori yang cukup tinggi. Hal ini merupakan salah satu tanda yang menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin baik. Angka IPM Daerah Istomewa Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, IPM di Daerah Istimrwa Yogyakarta tercatat sebesar 76,32 naik dari angka IPM tahun 2010 yang sebesar yaitu 75,77. Nilai IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011 menduduki peringkat 4 dari seluruh provinsi di Indonesia.⁴

Dari sisi PAD atau pendapatan Asli Daerah, rata-rata capaian realisasinya dari yang ditargetkan menunjukkan sesuai angka yang diharapkan, yaitu melebihi dari yang ditargetkan dan memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat serta persentasenya melebihi dana perimbangan. Selama tahun 2004-2007 peningkatan PAD rata-rata sebesar 12,17%, sedangkan perbandingannya dengan Dana Perimbangan memperlihatkan angka 49,6% berbanding 42,6%.

Sumberdaya mineral atau bahan tambang yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Bahan Galian C yang meliputi, pasir, kerikil, batu gamping, kalsit, kaolin, dan zeolin serta breksi batu apung. Selain bahan galian Golongan C tersebut, terdapat bahan galian Golongan A yang berupa Batu Bara. Batu bara ini sangat terbatas jumlahnya, begitu pula untuk bahan galian golongan B berupa

⁴ Draft Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (R P J M D) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017 di kutip dari dppka.jogjaprov.go.id/document/RPJMD/RPJMD29APRIL.pdf

Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Barit (Ba), dan Emas (Au) yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo .

Pariwisata merupakan sektor utama bagi pemasukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring dengan peran sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak roda perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dikatakan bahwa industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat ini memiliki prospek atau jaminan yang baik dan memiliki daya tarik yang kompetitif. Komitmen dan konsistensi pembangunan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjalan berkelanjutan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penerapannya fokuskan pada strategi pengembangan tujuan pariwisata, pengembangan pemasaran dan pengembangan kemitraan, ketataruangan, aksesibilitas, Sumber Daya Manusia, kelembagaan, investasi dan pemberdayaan masyarakat.

Banyaknya obyek wisata dan daya tarik wisata yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyerap kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Banyaknya upacara keagamaan yang di adakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan budaya dari berbagai agama serta didukung oleh kreatifitas seni dan keramahtamahan masyarakat, membuat Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang memberikan keuntungan secara luas. Secara geografis, Daerah Istimewa Yogyakarta juga diuntungkan oleh jarak antara lokasi obyek wisata yang terjangkau dan mudah untuk ditempuh Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta

memperlihatkan kecenderungan positif. Pada tahun 2007 kunjungan wisatawan domestik yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 1.146.197 orang, sedangkan wisatawan mancanegara mencapai 103.224 orang atau total jumlah wisatawan sebanyak 1.249.421 orang.⁵

Untuk kegiatan pada sector ekonomi dan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta terkonsentrasi di wilayah bagian tengah dengan pusatnya di kotamadya Yogyakarta. Khusus Kabupaten Gunung Kidul, dan kabupatena Kulon Progo, tingkat perkembangan wilayah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya relatif tertinggal di bandingkan daerah lain di Yogyakarta. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah ini lebih lambat dibandingkan dengan wilayah lainnya sehingga mengakibatkan bertambahnya kesenjangan antar wilayah yang berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Laju inflasi di Kota Yogyakarta tahun 2014 sebesar 6,59%. Angka inflasi tahun 2014 ini lebih rendah dibandingkan inflasi pada tahun 2013 yang besarnya 7,32%. Laju inflasi 2014 berasal dari kelompok pengeluaran Transportasi dan Komunikasi 9,36%, perumahan 8,92%, bahan makanan 7,70%, kesehatan 5,49%, sandang 3,61%, Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 2,95%, dan terendah adalah kelompok pengeluaran Pendidikan Rekreasi dan Olah raga 2,37%.⁶

Struktur perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011, didominasi oleh besarnya kontribusi sector jasa dengan kontribusi sebesar

⁵ Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013 dikutip dari www.birohukum.jogjaprov.go.id/.../view.php?...Perda/.../2009/Perda+N

⁶ LKPJ Laporan Pertanggungjawaban Gub5ernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dikutip dari bappeda.jogjaprov.go.id/assets/uploads/docs/LKPJ_2014_Pdf1.pdf

20,05%, sektor perdagangan, hotel dan restoran (19,79 %), dan sektor industry pengolahan(14,36%). Selain ketiga sektor tersebut, sektor lainnya yang memiliki kontribusi cukup besar adalah sektor bangunan (10,38%), dan sektor pertanian (14,23%). Perkembangan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir mengalami percepatan, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 mencapai 5,32% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk pertumbuhan sektor, seluruh sektor mengalami pertumbuhan yang cukup positif pada tahun 2011 dan sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi serta sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: pertambangan (11,96%), sektor pengangkutan dan komunikasi (8,00%), dan keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (7,95%).⁷

Dalam masalah pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode antara tahun 2006-2013 menunjukkan kinerja yang kurang begitu baik. Laju pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita DI Yogyakarta dari angka rata-rata nasional.⁸

Namun, di lain sisi pertumbuhan ekonomi di Daerah istimewa Yogyakarta mengalami perbaikan. Perkembangan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir mengalami percepatan, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 mencapai 5,32% lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sementara untuk pertumbuhan pada beberapa sektor, seluruh sektor tumbuh

⁷ Profil Pembangunan Di.Yogyakarta dikutip dari rsimreg.bappenas.go.id/view/profil/clickD.php?id=14

⁸ Perkembangan Pembangunan Provinsi D.I Yogyakarta 2014 dikutip dari perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/157872-%5B

dengan baik pada tahun 2011 dan sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi serta sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: pertambangan (11,96%), sektor pengangkutan dan komunikasi (8,00%), dan keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (7,95%).⁹

Sementara untuk pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh kabupaten/kota rata-rata mengalami pertumbuhan yang cukup positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di alami oleh Kota Yogyakarta dengan laju pertumbuhan sebesar 5,64%, dan pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Gunung Kidul dengan laju pertumbuhan sebesar 4,33% dan di susul oleh Kabupaten Kulon Progo dengan laju pertumbuhan ekonomi 4,95%.

Pada bidang perdagangan ekspor dan impor, Perkembangan neraca perdagangan luar negeri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2006 hingga tahun 2010 mengalami surplus perdagangan. Surplus perdagangan terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu mencapai 11,5 juta US\$ atau meningkat sebesar 325,93 persen dari surplus tahun 2009. Sementara untuk perkembangan nilai ekspor dan impor, nilai ekspor terbesar terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 12,9 juta US\$ dan nilai impor pada tahun 2010 sebesar 1,4 juta US\$.¹⁰

⁹ Profil Pembangunan Di.Yogyakarta dikutip dari
rsimreg.bappenas.go.id/view/profil/clickD.php?id=14

¹⁰ *ibid*

B. Dinamika politik Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah istimewa Yogyakarta merupakan satu dari tiga daerah di Indonesia yang memiliki undang-undang keistimewaan selain undang-undang keistimewaan Aceh dan Undang-undang keistimewaan Papua. Selain adanya jaminan mengenai undang-undang otonomi daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta juga merupakan daerah keistimewaan yang diatur dalam undang-undang Undang-Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.¹¹ Berbagai dinamika mewarnai penetapan undang-undang keistimewaan Yogyakarta yang diputuskan pada tahun 2012 lalu. Terdapat banyak pertimbangan mengenai aspek ditetapkannya undang-undang keistimewaan tersebut.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI pada masa itu, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi wilayah bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pada setiap undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap diakui, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor

¹¹UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Pemerintah Daerah DIY Biro Hukum Setda DIY dikutip dari http://www.birohukum.jogjapro.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=455:uu-keistimewaan-diy&catid=107:provinsidiy&Itemid=532

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam pengisian jabatan kepala daerah wakil kepala daerah di laksanakan dengan ketetapan yang sesuai dengan undang-undang Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga hal ini memberikan dampak kepada kondisi politik di tingkat daerah yang lebih kondusif. Karena pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diputuskan dengan ketetapan tidak menimbulkan perebutan kekuasaan. Sehingga gejolak politik di tingkat daerah bisa diminimalisir. Keputusan mengenai adanya Undang-undang Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Undang Undang No 13 Tahun 2012 memiliki sejarah yang panjang. Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peranan yang penting. Terbukti pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 pernah dijadikan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813.

Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik yang terakhir Kasultanan tercantum dalam Staatsblaad 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan), diatur dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan DIY meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman.¹²

¹² Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013 dikutip dari www.birohukum.jogjaprov.go.id/.../view.php?...Perda/.../2009/Perda+N

Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kondisi politik di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong cukup kondusif. Hal ini dikarenakan Daerah istimewa Yogyakarta didukung oleh posisi Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya, serta adanya nilai-nilai keistimewaan dan peran budaya yang ada di pemerintahan, peran birokrasi, peran organisasi sosial politik, serta organisasi kemasyarakatan yang berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Sebagai masyarakat di kota pendidikan, tingkat kesadaran politik dan tingkat partisipasi politik masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk kategori cukup tinggi, sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap politik dan pemerintahan juga cukup tinggi. Dinamika politik di Daerah Istimewa Yogyakarta juga diwarnai oleh daya kritis dari pelajar dan mahasiswa serta masyarakat yang tercermin dalam banyaknya organisasi masyarakat /Lembaga Swadaya Masyarakat/lembaga-lembaga pemberdayaan politik masyarakat dan frekuensi demonstrasi.

Meskipun demonstrasi sering terjadi dan mewarnai perkembangan dinamika politik di Yogyakarta, namun demonstrasi tetap senantiasa berjalan dengan aman dan damai. Hal ini tidak terlepas dari hubungan yang baik dari berbagai aktor, baik pemerintah, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun tokoh-tokoh masyarakat yang berada di kawasan Yogyakarta. Sehingga mampu meminimalisir konflik yang mungkin bisa saja timbul dalam masyarakat.

Apalagi dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan terjadi perubahan paradigma peran pemerintah, dari pembina organisasi social politik dan organisasi masyarakat menjadi peran regulator, fasilitator dan pelayanan publik.

Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun Bappenas, pada tahun 2010 kinerja IDI Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat ke-17 dari 33 provinsi yang berada di Indonesia. Dari 3 aspek yang dinilai, skor untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 67,55 dan termasuk kategori Medium Performance Democracy. Untuk aspek kebebasan sipil skornya tergolong baik yaitu sebesar 92,15, sedangkan untuk aspek hak-hak politik skornya sebesar 52,52 dan angka aspek lembaga demokrasi skornya sebesar 60,48. Ekspresi dan artikulasi politik masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami peningkatan, dengan menggunakan dasar jumlah unjuk rasa atau demonstrasi per tahun, pada tahun 2011 jumlah unjuk rasa yang tercatat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemrov Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 54 unjuk rasa dalam 1 tahun, meningkat dibanding tahun 2010 sebanyak 45 unjuk rasa. Hal tersebut mungkin terkait dengan eskalasi politik di Daerah Istimewa Yogyakarta berkenaan dengan alot dan berlarut-larutnya pembahasan RUUK Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinilai kurang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.¹³

Kondisi dan perkembangan politik di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong relatif stabil dan kondusif. Meskipun sering terjadi konflik politik dan

¹³RENCANA PEMBANGUNAN SEKTOR POLITIK TAHUN 2014 dikutip dari http://bappeda.jogjaprov.go.id/assets/uploads/docs/Perencanaan_Pembangunan_Sektor_Politik_2014.pdf

gejolak konflik serta masalah-masalah sosial, tetapi tidak banyak memberi pengaruh terhadap stabilitas politik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong sudah cukup tinggi. Hal ini terlihat pada partisipasi masyarakat untuk ikut atau berperan aktif serta dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, kampanye pemilu dan penggunaan hak pilih mereka dalam pemilu.¹⁴

C. Keunggulan Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi sumber daya alam yang pada umumnya belum banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah ataupun dari para investor. Meskipun terdapat potensi pembangunan yang telah dimanfaatkan, namun tetap saja pemanfaatan sumber daya alam tersebut belum optimal untuk dikembangkan. Antara lain di bidang sumber daya manusia, pariwisata, industri, pertanian, serta pertambangan dan penggalian. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta terutama jika dilihat dan diukur dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang relatif baik merupakan tanda bahwa potensi tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup besar untuk berbagai kegiatan. Dengan banyaknya lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian yang memadai, maka Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

¹⁴ Review Rencana Strategis Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal Diy Tahun 2012 – 2017 dikutip dari www.jogjainvest.jogjaprovo.go.id/assets/RENSTRA.pdf
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikutip dari www.bphn.go.id/data/documents/01pddiy002.pdf

berkaitan dengan pengembangan industri ataupun pengembangan di bidang-bidang lain.

Berbagai penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terus dilakukan, publikasi ilmiah terus berkembang. Hal ini merupakan tanda atau indikasi adanya peningkatan kegiatan penelitian, transparansi ilmiah, dan aktivitas diseminasi hasil penelitian. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam dunia pendidikan dan industri mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi cukup tinggi ditandai dengan relatif tingginya indikator angka melek TI (IT literate rate) sebesar 20% (tertinggi nomor 2 di Indonesia). Pengembangan TI, terutama perangkat lunak (software) banyak dilakukan oleh pihak swasta dan perguruan tinggi yang ditandai dengan makin berkembangnya pengelola jasa pengembangan Teknologi Informasi. Upaya pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi oleh pihak industri dan masyarakat sudah sering dilakukan.

Pariwisata merupakan sektor utama bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring dengan peran sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dikatakan bahwa industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat ini memiliki prospek yang baik dan memiliki daya tarik yang kompetitif. Banyaknya obyek dan daya tarik wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan dalam negeri. Keanekaragaman upacara keagamaan yang sering di selenggarakan dan budaya dari berbagai agama serta didukung oleh kreatifitas seni dan keramamahaman masyarakat, membuat

Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan. Secara dari sisi geografis, Daerah Istimewa Yogyakarta juga diuntungkan oleh jarak antara lokasi obyek wisata yang terjangkau dan mudah ditempuh.

Potensi pariwisata juga didukung oleh adanya Indonesia Mini, karena di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak ditemukan pendatang yang datang ke Yogyakarta berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia maupun luar negeri. Dengan berbagai kepentingan dan tujuan, seperti pelajar, mahasiswa, dan usahawan. Kehadiran mereka dimungkinkan mampu membentuk berbagai akulturasi atau perkawinan budaya. Keberadaan mereka selain sebagai pasar yang sangat potensial, sekaligus juga merupakan alat promosi yang baik bagi pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada sector pariwisata, Pariwisata merupakan sektor utama bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring dengan peran sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dikatakan bahwa industri pariwisata Yogyakarta pada saat ini memiliki prospek yang baik dan memiliki daya tarik yang tinggi bagi wisatawan. Komitmen dan konsistensi pembangunan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta maka penerapannya di fokuskan pada upaya strategi pengembangan tujuan obyek wisata, pengembangan pemasaran, pengembangan kemitraan, ketataruangan, aksesibilitas, Sumber Daya Manusia, kelembagaan, investasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sektor pariwisata memiliki peranan sangat penting dan signifikan dalam upaya menjadi motor penggerak kegiatan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara umum menitik beratkan pada tiga sektor andalan yaitu: jasa-jasa; perdagangan, hotel dan restoran; serta pertanian. Dalam hal ini pariwisata memberi efek pengganda (multiplier effect) yang nyata bagi sektor perdagangan. Karena mampu memberikan efek berupa kunjungan wisatawan ke Yogyakarta. Selain itu, penyerapan tenaga kerja dan pemasukan terhadap perekonomian daerah sangat penting. Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan di obyek-obyek atau tujuan wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta memperlihatkan kecenderungan yang cukup positif dalam pengembangan pariwisata di Yogyakarta. Pada tahun 2007 kunjungan wisatawan nusantara yang berkunjung ke berbagai tujuan daerah wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 1.146.197 orang, sedangkan wisatawan mancanegara mencapai 103.224 orang atau total jumlah wisatawan sebanyak 1.249.421 orang.

Table 2.3 kunjungan wisatawan

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Pertumbuhan (%)	Wisatawan Nusantara	Pertumbuhan (%)
2004	103.401	8,13	1.688.599	21,43
2005	103.488	0,08	1.747.195	3,47
2006	78.145	(24,49)	836.682	(52,11)
2007	103.215	32,08	1.146.197	36,99
2008	128.660	24,65	1.156.097	1,60

Faktor pendukung pertumbuhan jumlah wisatawan diantaranya adalah DIY dipandang sebagai daerah yang relatif aman dan nyaman, memiliki beraneka ragam Daya Tarik Wisata yang dikelola dengan baik. Sebagai pusat budaya, DIY memiliki ragam daya tarik budaya mencakup dari masa Mataram Hindu hingga Mataram Islam diantaranya keberadaan peninggalan Candi dan Kawasan Keraton Yogyakarta.

Dalam sector industry, Industri yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut adalah industri kecil dan industri rumah tangga seperti industri batik; dan barang kerajinan dari kulit, perak, logam, tanah liat, bambu; serta komoditas pakaian jadi, makanan, cerutu, dan minuman. Varian andalan produk ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi produk olahan kulit, tekstil dan kayu. Pakaian jadi tekstil dan mebel kayu merupakan produk yang mempunyai nilai ekspor tertinggi. Namun demikian secara umum ekspor ke mancanegara didominasi oleh produk-produk yang dihasilkan dengan nilai seni dan kreatifitas tinggi yang padat karya (labor intensive). Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya adalah memberdayakan usaha mikro dan kecil dan menengah yang disinergikan dengan kebijakan program dari pemerintah pusat. Salah satu upaya pembinaan UKM adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif dan efisien, di samping itu dengan sentra akan banyak melibatkan usaha mikro

dan kecil. Pada 2010 tercatat sebanyak 1.926 koperasi aktif dan 13.998 unit usaha UKM.¹⁵

Sumber daya pertanian tersebar di berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komoditas yang paling potensial seperti padi, palawija dan hortikultura. Sementara itu, perkebunan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya merupakan perkebunan rakyat dan perkebunan milik badan usaha milik negara (BUMN) dengan komoditas andalannya adalah kopi, kelapa, tembakau, jambu mete, kapuk randu, lada, kakao dan cengkeh. Potensi perikanan yang berupa perikanan darat yang didukung oleh kegiatan-kegiatan intensifikasi pada lahan yang tersedia, budidaya perikanan air tawar, yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Demikian pula pemanfaatan bagi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Pada tahun 2010 produksi padi tercatat sebesar 823.887 ton (menurun sebesar 1,68 persen dari tahun 2009) dengan rincian 78,51 persen merupakan padi sawah dan 21,49 persen padi lading. Dengan luas panen masing-masing sebesar 106.907 ha dan 40.151 ha di peroleh angka produktivitas sebesar 60,5 kuintal per hektar untuk padi sawah 44,1 kuintal per ha. Produksi palawija didominasi oleh komoditas ubi kyu sebesar 1.114.665 ton, jagung sebesar 345.576 ton, kacang tanah dan kedelai masing 58.918 ton dan 38.244 ton. Ubi jalar, kacang hijau serta cantel relatif kecil masing-masing 6.484 ton, 610 ton, dan 228 ton.komoditas

¹⁵ JOGJAINVEST BKPM, Tentang BKPM dalam
<http://www.jogjainvest.jogjaprovo.go.id/id/tentang-bkpm>

mangalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2009 kacang hijau, jagung dan ubi kayu masing-masing sebesar 28,96 persen, 9,73 persen, 6.39 persen.

Produksi perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih didominasi oleh hasil perikanan budidaya air tawar. Pergeseran budaya dan pemenuhan kebutuhan akan protein hewani (ikan) di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dengan adanya peningkatan konsumsi ikan perkapita dari tahun ke tahun. Konsumsi ikan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 sebesar 15,49 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 17,03 kg/kapita/tahun atau mengalami peningkatan sebesar 9,94%. Namun demikian angka tersebut masih di bawah angka nasional yang mencapai 28,57 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi ikan dimungkinkan karena keberhasilan kegiatan sosialisasi gemar ikan serta didukung oleh kenaikan produksi ikan sebesar 12,70%.¹⁶Data perikanan tahun 2010 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat bahwa produksi perikanan mencapai 41.558,4 ton atau naik sebesar 70,72 persen dibanding dengan tahun 2009 yang tercatat sebesar 93,92 persen dari total produksi perikanan budidaya perikanan darat dan selebihnya 6,08 adalah hasil perikanan laut. Tahun 2010 nilai produksi perikanan sebesar Rp 647,02 milyar, atau naik sebesar 230,71 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 195,64 milyar. Andil perikanan darat sebesar 96,13 persen dan sisanya 3,87 persen.

¹⁶ Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013 dikutip dari www.birohukum.jogjaprov.go.id/.../view.php?...Perda/.../2009/Perda+N

Sumber daya mineral atau tambang yang ada berada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Bahan Galian C yang meliputi, pasir, kerikil, batu gamping, kalsit, kaolin, dan zeolin serta breksi batu apung. Selain bahan galian Golongan C tersebut, terdapat bahan galian Golongan A yang berupa Batu Bara. Batu bara ini sangat terbatas jumlahnya, begitu pula untuk bahan galian golongan B berupa Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Barit (Ba), dan Emas (Au) yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo. Keberadaan sumberdaya mineral ini, merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan.

Dari sisi kualitas sisi sumber daya manusia yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia di daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 berada pada peringkat kedua dari 33 provinsi, dan berada diatas rata-rata nasional. Perbaikan kualitas sumber daya manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta tercermin dari komposisi angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 40,24 persen pada tahun 2008 menjadi 52,87 persen pada tahun 2014. Perbaikan struktur angkatan kerja ini perlu terus didorong untuk mendukung transformasi ekonomi daerah berbasis perdagangan dan jasa.

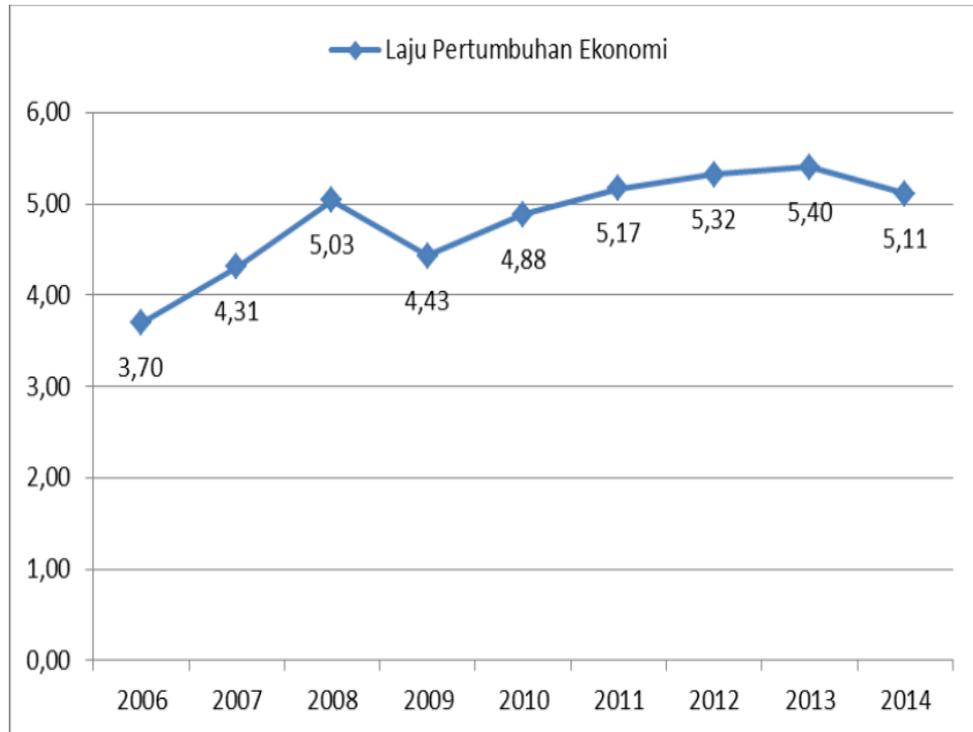
Lokasi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari Propinsi Jawa Tengah. Terutama dalam hubungannya dengan bidang pariwisata, budaya, perdagangan, dan pendidikan. Propinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang juga cukup strategis, karena terletak di tengah-tengah pusat kegiatan ekonomi Jawa, yaitu antara pusat pengembangan kawasan Jawa bagian barat dan kawasan Jawa bagian timur melalui jalur selatan. Hal ini membawa kemungkinan peluang bagi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperluas jaringan pariwisata, pemasaran dan perdagangan antardaerah.

D. Dinamika Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta

Laju pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu 2009 hingga 2013 cenderung mengalami kenaikan dari sebesar 4,43% pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 5,40% pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,29 poin menjadi sebesar 5,11%.

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama tahun 2013 didorong oleh pertumbuhan positif di semua sektor perekonomian. Pertumbuhan yang tertinggi terjadi di sektor industri pengolahan, yang mampu tumbuh sebesar 7,81%, setelah pada tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan negative sebesar 2,28%. Golongan industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil, produk tekstil, alas kaki dan kulit; dan industri furnitur memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan di sektor industri pengolahan.

Grafik 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2014 (%)



Sumber: BPS DIY

Produksi industri pengolahan tersebut sangat dipengaruhi oleh permintaan domestik melalui kegiatan pariwisata maupun permintaan ekspor. Pertumbuhan tertinggi berikutnya dihasilkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6,54% dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,30%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa yang cukup dominan dalam struktur perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta juga mampu tumbuh meyakinkan masing-masing sebesar 6,20% dan 5,57%. Sektor pertanian menjadi lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan terendah, meskipun masih

tumbuh positif sebesar 0,63% dan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Besarnya andil atau sumbangan masing-masing sektor dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh sektor-sektor yang memiliki nilai nominal besar, walaupun pertumbuhan sektor yang bersangkutan relatif kecil. Sektor yang memberi sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan andil 1,31%. Besarnya andil yang diberikan oleh sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa terhadap pertumbuhan ekonomi DIY masing-masing sebesar 0,98%, meskipun dari sisi pertumbuhan yang dihasilkan sektor industri pengolahan menjadi yang tertinggi. Kontribusi yang terendah terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,03%.

Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah, keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisisnya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Table 2.4 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja	Surplus/Defisit (Juta Rupiah) Ratio	Ratio Pendapatan terhadap Belanja
D.I.Yogyakarta	2.583.056,76	2.509.643,37	73.413,39	1,03
Kab. Kulonprogo	1.003.179,22	964.587,55	38.591,68	1,04
Kab. Bantul	1.520.302,70	1.387.719,17	132.583,52	1,10
Kab. Gunungkidul	1.242.092,68	1.180.155,60	61.937,08	1,05
Kab. Sleman	1.899.525,64	1.693.528,30	205.997,34	1,12
Kota Yogyakarta	1.309.580,19	1.232.911,93	76.668,26	1,06

Sedangkan sebagai syarat untuk melaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan dalam kewenangan otonomi daerah adalah adanya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan. Dimana daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Oleh sebab itu pemerintahan daerah harus mengoptimalkan pemasukan daerah Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, seiring dengan perkembangan perekonomian dan tanpa

mengurangi alokasi faktor-faktor produksi.¹⁷ Dalam table berikut ini akan terlihat Sumbangan PAD masing-masing pemerintah kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap total pendapatan ataupun terhadap total belanja.

Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persentase PAD terhadap Belanja
D.I. Yogyakarta	2.583.056,76	2.509.643,37	1.004.063,12	38,87	40,01
Kab. Kulonprogo	1.003.179,22	964.587,55	95.991,51	9,57	9,95
Kab. Bantul	1.520.302,70	1.387.719,17	224.197,86	14,75	16,16
Kab. Gunungkidul	1.242.092,68	1.180.155,60	83.427,45	6,72	7,07
Kab. Sleman	1.899.525,64	1.693.528,30	449.270,30	23,65	23,65
Kota Yogyakarta	1.309.580,19	1.232.911,93	383.052,14	29,25	31,07

¹⁷ Statistik Keuangan Daerah Regional Financial Statistics Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 - 2014 Dikutip dari yogyakarta.bps.go.id/.../Statistik-Keuangan-Daerah-Istimewa-Yogyakarta...

Tabel 2.6 Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rupiah)	Rencana Belanja (Juta Rupiah)	Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)	Persentase PAD terhadap Rencana Pendapatan	Persentase PAD terhadap Rencana Belanja
D.I. Yogyakarta	3.100.197,64	3.330.069,35	1.233.738,56	39,80	37,05
Kab. Kulonprogo	1.031.123,94	1.045.554,90	92.815,16	9,00	8,88
Kab. Bantul	1.687.985,46	1.734.327,11	K265.128,26	15,71	15,29
Kab. Gunungkidul	1.295.207,00	1.345.370,67	90.333,15	6,97	6,71
Kab. Sleman	1.869.792,74	1.978.674,63	383.497,91	20,51	19,38
Kota Yogyakarta	1.210.102,19	1.422.093,34	404.272,61	33,41	28,43